

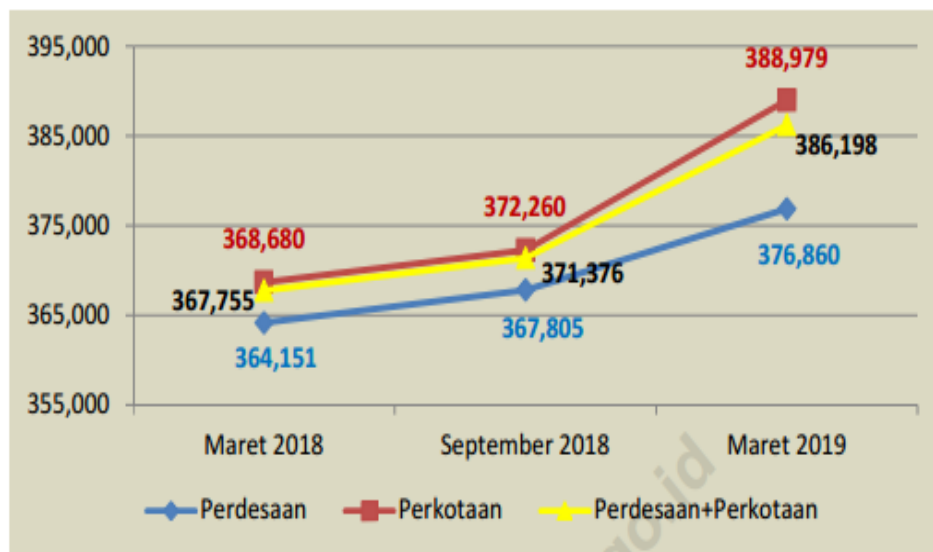
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan di kota besar seperti Bandung menjadi masalah yang kompleks untuk dipecahkan dan bersifat multidimensional. Kemiskinan berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Pemilihan Kota Bandung sebagai obyek penelitian didasarkan pada pertimbangan: 1). Angka lulusan SD bagi masyarakat miskin di Kota Bandung selama tahun 2013-2018 tinggi, 2). Jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja, salah satu yang tertinggi di Jawa Barat, 3). Pertumbuhan ekonomi sangat tinggi namun pengeluaran keluarga miskin rendah, Kota Bandung mengalami ketimpangan yang tertinggi. Karakteristik kemiskinan di Kota Bandung adalah tingginya disparitas kemiskinan. Menurut Data BPS (2019) tingkat kemiskinan di kota memiliki kenaikan lebih tinggi dibandingkan di desa. Kenaikan pendapatan perkapita masyarakat miskin di perkotaan lebih rendah dibandingkan kenaikan kelompok masyarakat kaya.

Hal ini menjadikan kesenjangan menjadi lebih tinggi di perkotaan. Garis Kemiskinan perkotaan seperti Kota Bandung kenaikannya lebih tinggi, yaitu dari Rp. 368.680,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp. 388.979,- per kapita per bulan pada Maret 2019. Sedangkan Garis Kemiskinan perdesaan mengalami kenaikan dari Rp. 364.151,- per kapita per bulan di Maret 2018 menjadi Rp. 376.860 seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Garis Kemiskinan Pedesaan

Sumber: BPS Jawa Barat 2019

Jumlah pengeluaran perkapita masyarakat miskin di Kota Bandung jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran rata-rata penduduk perkapita pertahun. Mengacu pada data BPS Kota Bandung (2019) Pengeluaran per kapita masyarakat miskin hanya sebesar Rp. 4.424.160 berada jauh di bawah rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Bandung tahun 2018 mencapai Rp. 16.630.000 tahun.

Persoalan kemiskinan di Kota Bandung bukan hanya persoalan kemiskinan jumlah dan persentase penduduk miskin. Aspek lain terkait kemiskinan adalah sebaran baik di kota maupun di pedesaan terlebih bahwa, kemiskinan di pedesaan akan berdampak pada arus urbanisasi dan pada akhirnya membebani Kota Bandung. Tanpa bekal pendidikan dan keterampilan maka arus urbanisasi ke kota seperti Kota Bandung akan menambah tingkat kemiskinan. Menurut BPS (2019) ada peningkatan kesenjangan pendapatan di pedesaan.

Kota-kota besar perlu mengantisipasi adanya arus urbanisasi dengan mengelola faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan menjadi lebih tinggi.

Kota Bandung merupakan kota besar yang memiliki sejumlah persoalan kompleks terkait dengan kemiskinan. Sebagai kota besar tingkat pendidikan warga miskin Kota Bandung yang < SD sebesar 20.43 %, Tamatan SD/SMP/SLA sebesar 61.62 % sedangkan > SMA 17.65 %. Untuk ukuran kota besar, Kota Bandung tertinggal dalam hal pendidikan. Contoh 35.38 % warga Kota Bogor miskin berpendidikan > SMA atau Kota Depok yang mencapai 43.60 %. Komposisi Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang tidak bekerja adalah 52.07 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa barat.

Bandung adalah kota yang sangat dinamis. Pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir (sekitar 8 % pertahun) selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (6 %). Sebagian besar pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh aktivitas ekonomi di sektor jasa. Sebagai kota jasa, dinamika aktivitas ekonomi di sektor tersebut juga terasa sangat kentara dan menghasilkan kesenjangan kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diikuti dengan jumlah pengeluaran memadai bagi penduduk miskin di Kota Bandung. Kondisi tersebut menjadi pertanyaan bahwa, sebenarnya angka pertumbuhan tinggi perekonomian tidak didukung oleh peningkatan jumlah pengeluaran pada kelompok miskin. Rata-rata pengeluaran kelompok masyarakat miskin ditopang oleh bantuan sosial bukan aktivitas produktif masyarakat miskin.

Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi kota besar termasuk di Kota Bandung. Tingginya angka pengangguran merupakan fenomena yang terjadi di Kota Bandung. Banyaknya jumlah angkatan tenaga kerja yang ingin memasuki dunia pekerjaan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran adalah terlampau banyaknya tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal, sehingga ketika pekerjaan di sektor formal tidak tumbuh dan berkembang, masyarakat tidak berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor swasta.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung menurut Jenis Kelamin (persen), 2015-2018 perempuan meningkat sedangkan untuk laki-laki menurun seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung menurut Jenis Kelamin (Persen), 2015-2018

Indikator	TPAK		TPT	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	78,11	46,73	8,49	9,91
2017	80,52	45,51	7,88	9,43
2018	78,23	45,57	7,16	9,49

Sumber: BPS Kota Bandung 2019

TPAK laki-laki pada bulan Agustus 2018 lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2017, TPAK laki-laki sebesar 80,52 persen menurun 2,29 poin di tahun 2018 menjadi 78,23 persen. Sedangkan TPAK perempuan tahun 2017 sebesar 45,51 persen, naik 0,06 poin menjadi 45,57 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dalam aktivitas bekerja atau usaha ekonomi, sedangkan partisipasi perempuan masih sangat rendah dalam kegiatan ekonomi. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Bandung menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di Kota Bandung tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Pada tahun 2018 lapangan kerja utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 2018 di Kota Bandung adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel. Angkatan kerja pada kategori tersebut mencapai 41,46 persen. Kategori Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan adalah lapangan pekerjaan utama kedua yang menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 22,82 persen.

Kondisi kemiskinan yang tidak menunjukkan perbaikan tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi disektor riil. Faktor lain yang terkait kemiskinan adalah Inflasi. Inflasi mengalami peningkatan tinggi mencapai 17,1 persen, terutama sejak kenaikan harga BBM bulan Oktober 2005. Kenaikan inflasi yang sangat tajam didorong oleh kenaikan harga BBM dan kenaikan harga yang diatur pemerintah khususnya tarif angkutan. Di samping menyebabkan tingginya ekspektasi Inflasi, kenaikan harga dan kelangkaan BBM telah menyebabkan kenaikan harga yang tinggi pada kelompok bahan makanan yang bersifat fluktuatif akibat kelangkaan pasokan dan gangguan distribusi di berbagai daerah.

Angka IPM menunjukan masih adanya disparitas baik antar Kabupaten Kota, Provinsi. IPM sebagai gambaran peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dimensi pendidikan diwakili

oleh Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah naik 0,28 tahun dari 13,90 tahun pada tahun 2017 menjadi 14,18 di tahun 2018. Rata-rata lama sekolah tahun 2018 mencapai 10,63 tahun atau setara dengan kelas 10 SMU. Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan 0,04 tahun jika dibandingkan tahun 2017.

Jumlah penduduk yang bekerja disektor formal lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang bekerja disektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimiliki warga Kota Bandung lebih banyak disektor formal. Penduduk Kota Bandung yang bekerja disektor formal persentasenya lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Pada tahun 2015 penduduk yang bekerja disektor formal adalah sebesar 76,05 persen, tahun 2017 sebesar 64,53 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 65,45 persen dari total penduduk Kota Bandung usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu sebagai pekerja formal.

Kesehatan adalah salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan. Salah satu sasaran pokok RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan tujuan membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya. BPS Kota Bandung (2019) menjelaskan selama periode 2010 hingga 2018, Kota Bandung mampu meningkatkan UHH (Usia Harapan Hidup) sebesar 0,28 tahun. Kurun waktu tersebut, rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,05 persen per tahun. Pada tahun 2010, UHH Kota Bandung sebesar 73,72 tahun dan tahun 2018

mencapai 74 tahun. Selama tahun 2018 tercatat terdapat 41.001 kelahiran bayi hidup di mana 2,17 persen atau 889 bayi diantaranya termasuk bayi berat badan lahir rendah (BBLR). Hal ini layak diperhatikan agar prosentase bayi dengan berat lahir rendah dapat terus ditekan.

Tingkat kesehatan masyarakat Kota Bandung selama tahun 2018 tercatat bahwa penyakit Nasodarangitis Akuta adalah penyakit yang paling banyak ditangani di Puskesmas Kota Bandung. Diikuti oleh Hipertensi Primer dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas Akut Tidak Spesifik sebagai penyakit kedua dan ketiga yang paling banyak ditangani di Puskesmas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ada kebutuhan terhadap layanan kesehatan yang lebih efektif terutama pada pencegahan penyakit. Rasio jumlah pelayan kesehatan dibandingkan dengan jumlah masyarakat Kota Bandung masih jauh belum merata penyebarannya. Pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan/pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pendapatan penting untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan. Menurut OECD (2018) saat ini meningkatkan pendapatan menjadi tantangan fiskal yang penting bagi Pemerintah Indonesia. Rendahnya pendapatan menunjukkan pola konsumsi bisa diartikan sebagai jumlah persentase dari distribusi pendapatan terhadap masing-masing pengeluaran pangan, sandang, jasa-jasa serta rekreasi dan hiburan rendah. Rendahnya pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pengeluaran di Kota Bandung sendiri.

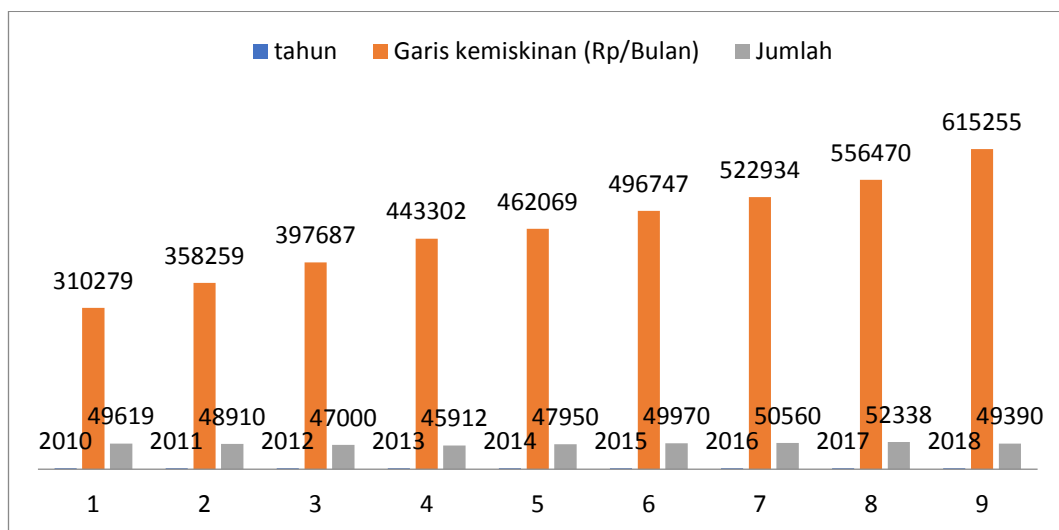
Peningkatan pendapatan belum ideal artinya belum diikuti dengan pemerataan pendapatan, padahal pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional. Ketimpangan masih terjadi dan yang menikmati hasil pembangunan adalah kelompok penduduk tertentu dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Angka gini ratio Kota Bandung sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk pada kurun waktu tahun 2014-2017 masih di atas 0,4. Angka gini rasio Provinsi Jawa Barat sebesar 0,3, ketimpangan pendapatan Kota Bandung lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Angka gini rasio Kota Bandung relatif lebih stabil dibandingkan gini rasio Provinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung cukup tinggi sebagai salah satu kota besar. Faktor yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi antara lain diduga pendidikan, IPM, serta Inflasi. Menurut *Centre for Economic and Development Studies* (2014) hanya setengah dari pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terealisasikan dalam peningkatan konsumsi warga Kota Bandung. Kota Bandung mengalami ketimpangan yang tinggi dan menjadi sumber dari berbagai penyakit-penyakit sosial seperti kecemburuan dan kejahatan (diakses 10-12-2019 <http://ceds.fe.unpad.ac.id/>). Pertumbuhan ekonomi di kota seperti Bandung meskipun tinggi tetap mendorong munculnya kesenjangan.

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung tetap menjadi fokus utama pemerintah untuk diselesaikan melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi yang adil bagi masyarakat. Masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi adalah dua sisi yang perlu mendapatkan perhatian melalui penelitian

ilmiah. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terutama di Kota Bandung penting untuk dianalisa karena menimbulkan gejala sosial politik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara misalnya kriminal, kesenjangan sosial dan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang lemah dapat menurunkan daya beli masyarakat, karena orang yang menganggur berarti tidak berpenghasilan dan bekerja tidak penuh bahkan masalah sosial yang berdampak pada produktivitas serta kualitas hidup.

Kota lain seperti Depok memiliki masalah yang relatif sama tentang kemiskinan. Menurut data BPS (2019) bahwa tingkat kemiskinan Kota Depok mengalami penurunan seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 2 Garis Kemiskinan Kota Depok Maret 2018

Sumber : BPS Depok dalam angka 2019

Tingkat kemiskinan di Kota Depok mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentasenya. Pemerintah Kota Depok terus meningkatkan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, terutama

program Jalinkesra. Serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin melalui kemudahan akses modal. Selama tahun 2014-2018, persentase penduduk miskin di Kota Depok cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada 2010 penduduk miskin Kota Depok sebesar 2.84 % atau sejumlah 49619 jiwa. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan sebesar 2.75 % atau sejumlah 48910 jiwa. Tahun 2012 sebesar 2.46 % atau sejumlah 47000 jiwa. Tahun 2013 sebesar 2.32 atau 45912 jiwa. Tahun 2013 sebesar 2.32 % sebesar 47950 jiwa tahun 2014 sebesar 2.4 % atau sebesar 49970 jiwa. Pada tahun 2015 % sebesar 2.34 % atau sebesar 50560 jiwa pada tahun 2016 menjadi 2.34 % atau sejumlah 52338 jiwa. Pada tahun 2018 menurun 2.14% dari jumlah penduduk keseluruhan dengan jumlah 49390 jiwa.

Garis kemiskinan Kota Depok pada 2014 sebesar Rp. 462.069 (perbulan) tahun 2015 menjadi Rp. 496.747 pada tahun 2015. Kemudian dari tahun 2016 lebih besar Rp. 522.934, pada tahun 2017 Rp. 556.470 dan pada tahun 2018 sebesar 615.255 seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2
Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Depok Tahun 2014-2018

Tahun	Garis kemiskinan	Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)	Jenis Keparahan kemiskinan (P2)
2014	462069	0.38	0.12
2015	496747	0.26	0.11
2016	522934	0.26	0.09
2017	556470	0.27	0.07
2018	462069	0.26	0.05
2019	644.860	0.24	0.04

Sumber: BPS Kota Depok 2019

Pada tahun 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah 0.38 dengan jenis keparahan kemiskinan 0.12. Pada tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah 0.26 dengan jenis keparahan kemiskinan 0.11. Pada tahun 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah 0.27 dengan jenis keparahan kemiskinan 0.07. Pada tahun 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah 0.26 dengan jenis keparahan kemiskinan 0.07, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kota Depok memiliki pola yang serupa dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) antar waktu. Penurunan P2 menunjukkan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin rendah.

Penjelasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, Zuhdiyaty & Kaluge (2017), Mukhtar *et.al.*, (2019) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Rahayu (2018) menambahkan bahwa HDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi, PDB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi, jumlah pengangguran memiliki efek positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.

Tingkat pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut hasil penelitian Primandari (2018) mengemukakan permasalahan kemiskinan dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi makro seperti Inflasi dan Pengangguran. Pengangguran

pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Khumairoh *et.al.*, (2013) mengemukakan bahwa, ada hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi dengan kemiskinan. Kemiskinan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional per kapita sepanjang kebijakan mendukung alokasi anggaran untuk kelompok miskin baik untuk perbaikan struktural maupun kultural yang menyebabkan kemiskinan terjadi di kota-kota maupun di pedesaan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya Febriaty & Nurwani (2017) mengemukakan hal yang sama tentang kemiskinan. Inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Namun secara umum disepakati bahwa, kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah. Susato *et.al.*, (2017) mengemukakan hal yang sama bahwa, Inflasi berpengaruh tidak langsung namun tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Kota Samarinda.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memperoleh penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan terus menjadi masalah di kota seperti Bandung. Judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah: **“Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Kota Bandung Selama Tahun 2003-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat pengangguran di Kota Bandung pada kelompok masyarakat miskin cukup tinggi.
2. Kemiskinan di kota memiliki kenaikan lebih tinggi dibandingkan di desa.
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat miskin.
4. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat atau dengan Kota/Kabupaten di Jawa Barat lain.
5. Tingkat pertumbuhan IPM masyarakat memiliki kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dengan ekonomi masyarakat miskin.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang tersebut, maka Identifikasi Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Pengangguran, Inflasi, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Kota Bandung selama tahun 2003-2018?
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kota Bandung selama tahun 2003-2018 baik secara simultan maupun parsial?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Perumusan Masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Tingkat Pengangguran, Inflasi, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Kota Bandung selama tahun 2003-2018.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Kota Bandung selama tahun 2003-2018 baik secara simultan maupun parsial.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi kontribusi bagi:

1. Pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.
2. Masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor pengaruh serta perbedaan tingkat kemiskinan di berbagai Kota di Jawa

Barat, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan kemiskinan di Bandung.

1.6 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada tahun 2003-2018. Asumsi yang mendasari pembatasan tersebut adalah ada krisis ekonomi yang dihadapi seperti pada tahun 2008 atau tahun 2012 di mana kondisi ekonomi dunia sedang menghadapi masalah. Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya bermula pada krisis ekonomi Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 2012 ekonomi Indonesia masih menghadapi risiko ketidakpastian global yang tinggi kendati kinerja ekonomi Indonesia tahun 2011 dukungan pasar domestik yang kuat. Tahun 2013 dan selanjutnya dianggap kondisi ekonomi Indonesia mulai stabil.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Teori modal baik sosial, keuangan, maupun pendidikan dapat menjelaskan lemahnya sumber daya sosial sebagai penyebab kemiskinan. Menurut Chambers (1998) bahwa, kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki enam dimensi yaitu: 1). Kemampuan, 2). Individu dan Aktivitas, 3). Kegiatan Usaha, 4). Hubungan Sosial, 5). Musim, dan 6). Jaringan Kemiskinan bukan hanya kekurangan uang ataupun tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti: Keterbatasan Sumber Daya, Tingkat Kesehatan Rendah, Pendidikan Rendah, Perlakuan Tidak Adil Dalam Hukum, Kerentanan Terhadap Ancaman Tindak Kriminal, Ketidakberdayaan Menghadapi Kekuasaan, dan Ketidakberdayaan.

Kemampuan: anggota keluarga dengan keterampilan yang berbeda memungkinkan lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan kondisi menentukan tingkat kemiskinan dalam keluarga, individu dan aktivitas. Anggota keluarga yang berbeda, berdasarkan jenis kelamin, usia, dan bakat dan keterampilan, melakukan tugas yang berbeda dan mengamankan makanan dan pendapatan diberbagai lingkungan dan cara yang berbeda dapat menentukan tingkat kemiskinan. Sumber pemasukan rumah tangga (aktivitas usaha) sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hubungan sosial menentukan tingkat kemiskinan sebagai contoh. Keluasan jaringan diperlukan untuk pinjaman kecil. Faktor lain yaitu

Musim antara lain terkait dengan permintaan tenaga kerja, penyakit, kematian, variasi, kualitas dan kuantitas makanan, kegiatan mata pencaharian, konsepsi, kehamilan dan kelahiran, harga, pendapatan, pengeluaran, termasuk pengeluaran dan hutang hanya sedikit dimensi kekurangan dan kesejahteraan yang bervariasi secara musiman. Dimensi terakhir yaitu jaringan/keterkaitan yaitu adanya hubungan yang saling mendukung. Definisi jaringan sebagai unsur modal sosial adalah sekelompok orang yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai informal di samping norma-norma atau nilai-nilai yang diperlukan untuk transaksi biasa di pasar. Jaringan sosial dapat terbentuk karena adanya nilai dan norma yang dipegang teguh bersama yang kemudian melandasi lahirnya kerja sama.

Lemahnya sumber daya antar generasi, modal sosial, dan jejaring sosial menyajikan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana kemiskinan dialami oleh keluarga dan masyarakat. Loury (1981), seorang ekonom, adalah salah satu penyelidik modal sosial Amerika yang paling banyak dikutip ini berhubungan dengan kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh lemahnya modal sosial yang dimiliki, hal ini dikemukakan oleh hasil penelusuran Wolf (2007). Gagasan Loury semakin sering digunakan dan diperiksa oleh para sosiolog sebagai salah satu ahli teori modal sosial pertama (Portes, 1998). Dalam penyelidikan transfer kekayaan antar generasi, Loury (1981) menemukan bahwa, kemiskinan keluarga secara signifikan membatasi sosial mobilitas dalam hal akses ke pendidikan dan sumber daya lainnya. Kemiskinan sebagai kondisi yang diturunkan antar generasi, bukan sebagai akibat dari kegagalan intelektual atau moral yang diwariskan, tetapi dari ketimpangan pendapatan dan kurangnya sistem

kesejahteraan redistributif. Masyarakat pendidikan tinggi sebagai penerima manfaat dari a sistem kelas bertingkat atau dilihat sebagai pemenang system “meritokrasi” pasar bebas.

Sosiolog yang menyelidiki konsep modal sosial memperluas gagasan bahwa, sumber daya keluarga dan masyarakat menentukan keadaan generasi mendatang termasuk kemiskinan. Coleman (1988) mengonseptualisasikan modal lebih dari sumber daya keuangan dan pendidikan. Perilaku dalam bingkai sosial sebagian ditentukan oleh norma, cita-cita, dan interaksi dengan komunitas dan individu lain. Modal sosial meliputi kekuatan dan kepercayaan hubungan interpersonal dalam keluarga dan lingkungan.

Modal finansial dan pendidikan latar belakang atau keterampilan (“modal manusia”) penting untuk transfer antar generasi, modal sosial adalah konsep dasar yang hilang dalam analisis kemiskinan. Bagi Coleman, keberhasilan seorang anak tergantung pada banyak jejaring sosial dan ikatan di dalam lingkungan, dan menghubungkan modal sosial, serta status sosial ekonomi. Kedua teori baik Loury (1981) maupun Coleman (1988) menunjukkan bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah modal sosial yang dimiliki. Modal sosial sebagai fungsi untuk mereduksi kemiskinan. Namun Chamber (1988) menegaskan bahwa persoalan kemiskinan adalah persoalan yang kompleks.

Teori klasik lain yang berkaitan dengan kemiskinan adalah *Human Capital Theory*. Salah satu ide terpenting dalam ekonomi tenaga kerja adalah seperangkat keterampilan pekerja yang dapat dipasarkan sebagai bentuk modal di mana para pekerja membuat variasi investasi. Perspektif ini penting dalam

memahami kedua investasi insentif, dan struktur upah dan pendapatan dan keterkaitannya dengan kemiskinan. Salah satu pandangan modal manusia dikemukakan oleh Theodore The Schultz modal manusia dipandang sebagian besar sebagai kapasitas untuk beradaptasi. Menurut pendekatan ini, modal manusia sangat berguna dalam menghadapi situasi “disekuilibrium” atau lebih umum, dengan situasi di mana ada lingkungan yang berubah, dan pekerja harus beradaptasi dengan ini.

Asumsi teori *human capital* bersumber pada ekonomi neo-klasik. Pertama bahwa, manusia adalah makhluk ekonomi, kedua terdapat hubungan antara modal manusia dengan *economic return* dan ketiga memaksimalkan serta menstabilkan kegiatan manusia pada hal-hal yang disukainya, sebagaimana dinyatakan oleh Sadona dan Aladi (2013:28) bahwa Ekonomi neo-klasik membuat tiga asumsi yang dapat diperdebatkan yang secara halus menentukan pendekatan teori HC. Pertama, mengadopsi paradigma antropologis dari *homo economicus*, yang mendefinisikan manusia sebagai orang yang sangat rasional yang dapat memasukkan emosi dan cita-cita dalam perhitungan memaksimalkan *utilitas*. Kedua, ekonomi neo-klasik mengasumsikan ada hubungan antara HC dan pengembalian ekonomi. Ini berpendapat bahwa ada efek kausal tanpa syarat, tanpa pengecualian dari HC terhadap produktivitas ekonomi dan mengasumsikan bahwa, investasi pendidikan adalah jalur yang pasti untuk mobilitas sosial ekonomi. Ketiga, ekonomi neo-klasik mengasumsikan prinsip *maksimisasi utilitas* dan stabilitas preferensi individu. Prinsip *maksimisasi utilitas* menyatakan bahwa,

manusia hanya terlibat dalam kegiatan di mana mereka dapat memaksimalkan manfaat material mereka.

Teori *Human Capital* (HCT) muncul dari ekonomi neo-klasik sebagai konsekuensi dari revolusi *Marginalist* dipimpin oleh Jevons, Walras dan Menger. Teori *Human Capital* modern di tahun 1960-an. Setelah karya Theodore Schultz seperti dikutip (Suryadi dan Budimansyah, 2009:25) menegaskan bahwa, pendidikan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Dalam teori ini diusulkan untuk memperbaiki pendidikan sebagai investasi dalam diri manusia dan untuk memperbaiki modal manusia. Investasi dalam pendidikan memberikan nilai lebih tinggi. Pandangan teori *The Human Capital* memperlakukan pendidikan dan pelatihan sebagai investasi dan menekankan dampak langsung penciptaan keterampilan terhadap produktivitas. Dengan demikian, tenaga kerja dan pengelolaan keterampilan dipandang sebagai penentu penting dari ekonomi nasional. Diantara proposisi utama *Human Capital Theory* adalah: *Human Capital* terkait dengan masalah-masalah ekonomi serta peningkatan kesejahteraan dalam suatu negara. Peningkatan jumlah modal manusia terutama pada penguasaan teknologi dan informasi akan mendorong perkembangan dan peningkatan produktivitas negara.

Pengembangan kualitas SDM merupakan kunci untuk berperan aktif dalam era globalisasi dan menempatkan bangsa agar tetap memiliki daya saing dan tidak menjadi pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain. Keberadaan SDM mendorong pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas dan

kemampuannya menciptakan inovasi. Pendidikan merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kinerja. Perkembangan serta penggunaan praktis teori *Human Capital* dalam dunia pendidikan cukup pesat termasuk dalam kebijakan.

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Khumairoh *et.al.*, (2013:1) menjelaskan hal yang sama bahwa, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan dan ini bisa terjadi karena adanya kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, dan sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dapat dilihat berdasarkan Indikator seperti yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 2010) melalui *Physical Quality of Life Index* (PQLI).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Pengertian lainnya kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan.

Kemiskinan secara kuantitatif adalah suatu keadaan di mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda, ada pula pengertian kemiskinan menurut para ahli yaitu, adalah kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak atau

kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

Adapun kategori kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan Struktural, sering disebut sebagai kemiskinan buatan (*man made poverty*). Baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, seperti sistem politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya dan oleh karenanya kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi rendah (*underdevelopment trap*) atau tidak mungkin sejahtera.
2. Kemiskinan Alamiah, lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kondisi demikian, peluang untuk melakukan dan meningkatkan produksi relatif kecil dan tingkat efisiensi produksinya relatif rendah.
3. Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, tidak mau kerja keras, jadi etos kerjanya sangat rendah, tidak disiplin dan sebagainya.
4. Kemiskinan Absolut, biasanya dipandang dari sisi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum. Biasanya didasarkan pada sejumlah kebutuhan nutrisi. Kemiskinan absolut sering juga disebut kemiskinan primer, bahkan disebut kemiskinan ekstrim.

Mengenai kemiskinan, Primandari (2018:57) menjelaskan bahwa, Kemiskinan secara absolut diukur berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

2.1.2 Definisi Pengangguran

Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti

mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Selain definisi di atas masih banyak istilah arti definisi pengangguran.

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara yang sedang berkembang, akan tetapi juga oleh negara-negara yang sudah maju. Secara umum, pengangguran dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Muana Nanga, 2001:253). Untuk mengukur pengangguran di dalam suatu negara biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (*unemployment rate*), yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja sendiri adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja, yang berada dalam kelompok umur tertentu.

Definisi pengangguran berdasarkan istilah umum dari pusat dan latihan tenaga kerja adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran dapat dibedakan berdasarkan kondisi pekerjaan yang dilakukan maupun waktu. Menurut Winardi (2010:288) Pengangguran dapat dikelompokkan ke dalam *voluntary unemployment*, *disguished unemployment*, *deflatory unemployment*, *frictional unemployment*. Menurut Muana Nanga (2001:254-256) dilihat dari sebab-sebab timbulnya, pengangguran dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pengangguran Friksional atau Transisi (*Frictional or Transitional Unemployment*).

Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan dalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari suatu daerah ke daerah lainnya atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja. Entah itu karena kendala informasi, waktu ataupun geografi.

2. Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*)

Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*) yaitu jenis pengangguran akibat perubahan struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan pasar tenaga kerja terjadi karena adanya peningkatan permintaan atas satu jenis pekerjaan, sementara jenis pekerjaan lainnya mengalami penurunan permintaan dan permintaan itu sendiri tidak melakukan penyesuaian dengan cepat atas situasi tersebut (Samuelson dan Nordhaus, 1992:335). Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya peralihan perekonomian di sektor perkebunan ke sektor industri.

3. Pengangguran Alamiah (*Natural Unemployment*)

Pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh atau tingkat pengangguran di mana inflasi yang diharapkan sama dengan inflasi aktual.

4. Pengangguran Silikal

Pengangguran Silikal ini pengangguran yang terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran daya beli masyarakat pun akan menurun. Akibatnya perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan banyak memberhentikan karyawannya.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin.

6. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah pengangguran di mana keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Ini disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan dan latar pendidikan.

7. Pengangguran Tidak Sepenuh Waktu

Pengangguran tidak sepenuh waktu/setengah pengangguran ini ditunjukan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai standar 7-8 per hari sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi.

8. Pengangguran Terselubung

Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah entah itu karena latar pendidikan dengan pekerjaan ataupun yang lainnya. Pengangguran terselubung (*disguised unemployment*), apabila dalam suatu kegiatan perekonomian jumlah tenaga kerja sangat berlebihan, maka yang akan terjadi yang dinamakan pengangguran terselubung. Sebagai akibat dari kelebihan tenaga kerja tersebut, sebagian tenaga kerja dari kegiatan yang bersangkutan dapat dipindahkan ke kegiatan lain. Kelebihan tenaga kerja dan pengangguran terselubung disektor pertanian banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang. Jumlah penduduk yang besar dan diikuti pula oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, menyebabkan rasio (perbandingan) tanah-tenaga kerja (*land-labour ratio*) di negara-negara tersebut menjadi sangat kecil. Jadi, sebagian dari tenaga kerja yang berada disektor pertanian adalah tidak produktif dan memiliki produktifitas kerja marginal (*marginal product of labour* atau MPL) yang sangat rendah atau bahkan sama dengan nol, sehingga apabila jam kerja mereka dikurangi atau mereka dipindahkan ke sektor lain tidak akan mempengaruhi produksi sektor pertanian.

9. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim, misalnya orang-orang yang bekerja sebagai petani sawah mereka akan bekerja selama musim panen setelah itu mereka akan menganggur.

Pengangguran musiman (*seasonal unemployment*), bentuk pengangguran lain yang sering kali terjadi disektor pertanian di negara-negara sedang berkembang adalah pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku pada waktu-waktu di mana kegiatan bercocok tanam. Setengah menganggur (*underemployment*), kelebihan penduduk disektor pertanian di negara-negara sedang berkembang yang disertai dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dari tahun ke tahun, telah menimbulkan percepatan dalam proses urbanisasi (pindahan penduduk dari desa ke kota). Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang berpindah ke kota mendapat pekerjaan. Di samping itu, ada pula yang mendapatkan pekerjaan, tetapi jumlah jam kerjanya adalah jauh lebih rendah dari jumlah jam kerja yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu (harian, mingguan, musiman).

2.1.3 Inflasi

2.1.3.1 Definisnisi Inflasi

Secara sederhana Inflasi diartikan sebagai menurunnya nilai mata uang. Secara umum inflasi dapat dirasakan pada saat harga meningkat akibat daya beli masyarakat meningkat atau kelangkaan *supply* serta kondisi sosial ekonomi yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 1.1 (2010) bahwa; Inflasi merupakan kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Menurut Bodie dan Marcus (2001:331) menjelaskan bahwa:

“Inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang”.

Lebih lanjut Calvo *et.al.*, (1997:4) menjelaskan bahwa: “Inflasi merupakan pertumbuhan harga yang terjadi secara proporsional dari periode saat ini dibandingkan periode sebelumnya”. Inflasi diartikan sebagai melonjaknya harga, ini terjadi bila harga-harga mengalami kenaikan sedang pendapatan tetap ini akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun, nilai uang menurun dan daya beli masyarakat menjadi rendah.

Inflasi merupakan indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat namun di sisi lain Inflasi pada tingkat tinggi (di atas dua digit) akan berdampak pada perekonomian itu sendiri seperti rendahnya daya beli masyarakat, pemutusan Hubungan Kerja (PHK), instabilitas ekonomi serta ancaman sosial. Contoh inflasi yang terasa mendorong instabilitas termasuk politik adalah inflasi yang terjadi pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi. Inflasi pada tingkat tinggi mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat. Inflasi adalah merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.

Mengenai Inflasi Winardi (2007:235) mengutip dari Gayer dan Rostow menjelaskan bahwa Inflasi adalah:

1. Setiap penambahan jumlah uang;
2. Kenaikan tingkat harga umum;
3. Kenaikan harga
4. Pertambahan utang Negara;
5. Pertambahan jumlah uang efektif melebihi kebutuhan;

6. Pertambahan jumlah uang beredar dan kenaikan harga yang tidak disertai dengan peningkatan *supply*;
7. Kenaikan harga setelah tercapai *full employment*;
8. Dipertahankannya *niveau* konstan, sewaktu-waktu biaya-biaya menurun, perubahan investasi yang tidak dapat dilanjutkan tanpa peningkatan *supply* uang;
9. Suatu keadaan di mana publik kehilangan kepercayaan terhadap nilai uang.

Secara garis besar teori yang membahas tentang Inflasi dapat dibagi dalam tiga kelompok dengan masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses terjadinya Inflasi. Ketiga teori Inflasi menurut Boediono (2005:167) dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Kuantitas dikenal juga dengan Irving Fisher.

Menurut teori ini Inflasi terjadi karena adanya pengaruh dari banyaknya jumlah uang yang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga.

2. Teori Keynes

Dalam teori Keynes, Inflasi terjadi karena adanya sebagian masyarakat yang hidup di luar dari batas ekonominya, sehingga permintaan masyarakat terhadap suatu barang akan melebihi jumlah yang telah tersedia. Biasanya masyarakat dalam golongan ini akan mengusahakan untuk memperoleh dana tambahan di luar batas kemampuan ekonominya sehingga segala bentuk keinginannya dapat terpenuhi.

3. Teori Strukturalis

Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang, karena Inflasi dikaitkan dengan

faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut defenisi faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini bisa disebut teori Inflasi jangka panjang. Menurut teori ini, ada 2 (dua) ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan Inflasi, antara lain: 1). Ketidakelastisan penerimaan ekspor. 2). Ketidakelastisan dari *supply* atau produksi bahan makanan di dalam negeri.

Berdasarkan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa, Inflasi adalah menurunnya nilai mata uang dan meningkatnya harga barang dan jasa secara terus menerus dari periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Inflasi

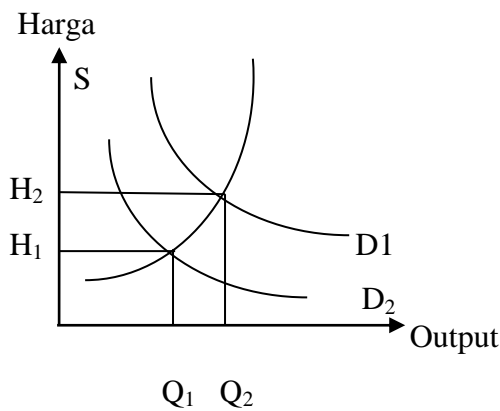
Inflasi terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokan berdasarkan tingkat persentase kenaikan harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian daerah atau negara. Berdasarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa serta menurunnya nilai mata uang. Inflasi dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun);
2. Inflasi sedang (antara 10-30% setahun);
3. Inflasi berat (antara 30-100% setahun);
4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun);
5. Cronis inflasition (berat dan terjadi dalam hitungan bulan).

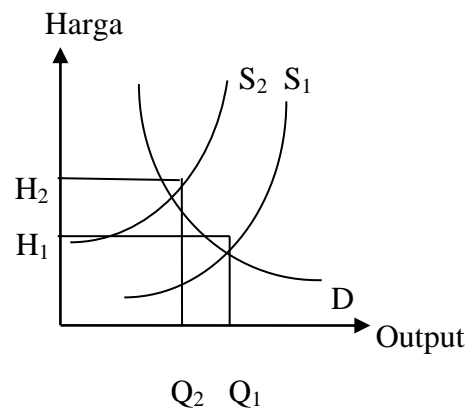
Inflasi pada tingkat ringan menunjukkan bahwa roda perekonomian berlangsung, adanya permintaan akibat meningkatnya daya beli masyarakat berdampak pada Inflasi sebagai contoh tingginya permintaan terhadap komoditas kendaraan bermotor akan memacu meningkatnya kenaikan harga.

Penggolongan yang kedua adalah berdasarkan penyebab terjadinya Inflasi yaitu:

1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut *demands pull inflation*.
2. Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Ini disebut *costpush inflation*.



Gambar 2.1.1



Gambar 2.1.2

Gambar 2. 1 Perbedaan dari Kedua Macam Inflasi

Gambar 2.1.1 menggambarkan suatu *demand inflation*. Karena permintaan masyarakat akan barang-barang (*aggregate demand*) bertambah (misalnya, karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit

yang murah), maka kurva *aggregate demand* bergeser dari D_1 ke D_2 . Akibatnya tingkat harga umum naik dari H_1 ke H_2 .

Pada gambar 2.1.2 menggambarkan *cost-push inflation* kita lihat bahwa bila biaya produksi naik (misalnya, karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak) maka kurva penawaran masyarakat (*aggregate supply*) bergeser dari S_1 ke S_2 .

Akibat dari kedua macam Inflasi tersebut, dari segi kenaikan harga output, tidak berbeda, tetapi dari segi volume output (GDP riil) ada perbedaan. Dalam kasus *demand inflation*, biasanya ada kecenderungan untuk output (GDP riil) meningkat bersama-sama dengan kenaikan harga umum. Besar kecilnya kenaikan output ini tergantung kepada elastisitas kurva *aggregate supply*; semakin mendekati output maksimum semakin elastis kurva ini. Sebaliknya, dalam kasus *cost inflation* biasanya kenaikan harga-harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang.

Menurut Bodie dan Marcus (2001) menjelaskan bahwa, Inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Secara makro Inflasi menyebabkan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun, nilai uang menurun dan daya beli masyarakat menjadi rendah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), instabilitas ekonomi serta ancaman sosial.

Perbedaan yang lain dari kedua proses Inflasi ini terletak pada urutan dari kenaikan harga. Dalam *demand inflation* kenaikan harga barang akhir (output) mendahului kenaikan harga barang-barang input dan harga-harga faktor produksi (upah dan sebagainya). Sebaliknya, dalam *cost inflation* kita melihat kenaikan harga barang-barang input dan harga-harga faktor produksi mendahului kenaikan harga barang-barang akhir (output).

Kedua macam Inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktek dalam bentuknya yang murni. Pada umumnya, Inflasi yang terjadi adalah kombinasi dari kedua macam inflasi tersebut, dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

Penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan asal dari Inflasi yaitu Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi dalam negeri timbul akibat defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, meningkatnya konsumsi makanan atau sayuran dan panen gagal atau adanya *supply* yang rendah terhadap daging sapi yang memicu kenaikan harga. Sedangkan Inflasi yang dari luar negeri adalah Inflasi akibat kenaikan harga-harga di luar negeri. Dampak kenaikan Inflasi terutama dari luar negeri mengakibatkan kenaikan indeks biaya hidup jika barang konsumsi atau jasa berasal dari barang impor.

Peningkatan harga di luar negeri memiliki potensi memicu Inflasi di dalam negeri terlebih tingkat impor negara tersebut tinggi. hal ini dijelaskan Qin dan He (2013:27) bahwa:

The econometric exercise has yielded strong and relatively robust evidence of globalisation on domestic inflation of ten countries from

G10. The evidence is shown in terms of both significant coefficient estimates corresponding to variables representing globalisation effects and also model simulation results. Among the relevant variables, import price has been verified as a key variable. In the majority of the ten cases, this variable is found to exert an increasing impact through a joint effect with an openness index in the long run and also a roughly accelerative effect in the short run.

Pada dasarnya menurut Winardi (2007:235) bahwa, Inflasi merupakan fenomena moneter yang disebabkan adanya *supply* uang beredar melebihi kebutuhan.

2.1.3.3 Dampak Inflasi

Inflasi pada tingkat ringan mendorong investasi dan tenaga kerja akibat meningkatnya daya beli masyarakat. Di sisi lain Inflasi pada tingkat hiper Inflasi merupakan masalah kronis yang berdampak pada runtuhnya perekonomian negara. Fundamental ekonomi akan jatuh serta menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Primandari (2018:58) menambahkan Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan dan terus menerus. Jika yang naik hanya satu barang saja tidak bisa disebut Inflasi kecuali kenaikan harga barang tersebut mempengaruhi harga barang lain. Dengan meningkatnya tingkat Inflasi menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menurun, akibatnya tingkat kemiskinan semakin tinggi.

Inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak yaitu Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat atau dinamakan sebagai efek redistribusi dari Inflasi (*redistribution effect of inflation*). Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab *redistribution* pendapatan yang terjadi

akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil orang lainnya jatuh.

Inflasi dapat menyebabkan penurunan di dalam efisiensi ekonomi atau ekonomi biaya tinggi. Hal ini terjadi karena Inflasi dapat mengarahkan penggunaan sumber daya dari investasi yang produktif ke investasi yang tidak produktif, sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif. Ini disebut sebagai “*efficiency effect of inflation*”. output yang dihasilkan suatu proses produksi tidak memiliki nilai lebih besar dibanding input.

Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja, secara langsung dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan dan juga memotivasi orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.

Inflasi dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi keputusan ekonomi. Jika konsumen memperkirakan tingkat Inflasi di masa datang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang secara besar-besaran pada saat sekarang ketimbang mereka menunggu tingkat harga meningkat lagi. Begitu pula halnya dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, jika mereka menduga bahwa, tingkat Inflasi akan naik di masa mendatang, maka mereka akan mengenakan tingkat bunga tinggi atas pinjaman yang diberikan sebagai langkah proteksi dalam menghadapi penurunan pendapatan riil dan kekayaan (*losses of real income and wealth*). (Bradley, 1985 : 95) dalam Muana Nanga 2001:253.

Mengenai dampak Inflasi Qin dan He (2013:1) bahwa, Inflasi berdampak pada resesi ekonomi dunia yang berdampak sistemik terutama di negara-negara dengan fundamental ekonomi yang lemah hal ini dicontohkan pernah terjadi pada tahun 2008 seperti dijelaskan bahwa: *The effect of globalisation on inflation of the last two decades constitutes one of the unsettled issues in the recent debate over the state of macroeconomics in the wake of the latest global recession triggered by the 2008 financial crisis.* Lebih lanjut Hachiicha dan Lean (2013:2) menjelaskan bahwa, Inflasi memiliki pengaruh yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti dijelaskan:

One of the most valuable subjects in macroeconomics is to treat the effect of inflation on output. Macroeconomists and monetary policy advisors have been convinced that more unstable prices are potentially damaging the economic growth of an economy.

Secara umum tingkat Inflasi yang tinggi berdampak pada kegiatan ekonomi serta mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi karena tidak ada lagi kecenderungan kondisi ekonomi yang mengarah pada keseimbangan.

2.1.4 IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

2.1.4.1 Definisi IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. menurut Badan Pusat Statistik

(2014) manfaat IPM bagi Indonesia antara lain merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.

2.1.4.2 Pengukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Todaro mengatakan bahwa, ada tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang sesungguhnya.

1. Kecukupan (*sustenance*): Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Harga Diri (*self-esteem*): menjadi manusia seutuhnya;
3. Kebebasan dari Sikap Menghamba: Kemampuan untuk Memilih.

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai serangkaian usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga pembangunan infrastruktur akan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Implikasi dari perkembangan kegiatan ekonomi ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja yang akan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi akibat peningkatan pendapatan masyarakat (Todaro, 2006:22).

Pengukuran IPM yang ditetapkan oleh UNDP sebagai berikut: 1.

Dimensi Kesehatan, yang diukur dengan formula:

$$\text{Ikesehatan} = \text{AHH} - \text{AHHmin} = \text{AHH} - 25 \text{ AHHmaks} - \text{AHHmin} \text{ 85-25}$$

di mana:

AHH = Angka harapan hidup

AHH = Angka harapan hidup saat lahir

AHHmin = Angka harapan hidup saat lahir batas usia terendah

AHHmaks = Angka harapan hidup saat lahir batas usia tertinggi

Indeks pendidikan (*knowledge*), yang diukur dengan formula:

$$I_{pendidikan} = IHLS + IRLS \cdot 2.$$

Di mana: $I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan Negara i

IHLS = Indeks harapan lama sekolah

IRLS = Indeks rata-rata lama sekolah bruto negara i 2.

Indeks standar hidup layak (*standard of living*) yang diukur dengan formula: $I_{pengeluaran} = \frac{In_{pengeluaran} - In_{pengeluaranmin}}{In_{pengeluaranmax} - In_{pengeluaranmin}}$.

Di mana:

$I_{pengeluaran}$ = Produk Nasional Bruto

$In_{pengeluaranmin}$ = Produk Nasional Bruto minimum

$In_{pengeluaranmax}$ = Produk Nasional Bruto maksimum

Secara total, Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), dapat diukur dengan formula : $IPM = I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran}$ 3.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia yaitu, hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran; pengetahuan yang diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata masa sekolah, serta standar kehidupan

yang layak diukur dengan PNB per kapita produk domestik neto (Badan Pusat Statistik, 2015).

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 10,0 semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu (UNDP, 2007).

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ tahun	Variabel	Metode	Hasil
1	Van Indra Wiguna (2013) Analisis Pengaruh Pdrb, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010	PDB, Kemiskinan	Model analisis kuantitatif	PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel PDB menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 1 (satu) tidak menaikkan kemiskinan, tetapi dari hasil penelitian ini akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,309. Terdapat dampak tingkat pendidikan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Peningkatan angka melek huruf sebagai indikator pendidikan di Jawa Tengah sebesar 1 (satu) akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,016. Yang berarti bahwa peningkatan angka

No	Peneliti/ tahun	Variabel	Metode	Hasil
				melek huruf akan menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah. Tingkat pengangguran pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 1 (satu) tidak menurunkan kemiskinan akan tetapi dari hasil penelitian ini justru menaikkan kemiskinan sebesar 16,1.
2	Yarlina Yacoub (2012) Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Tingkat pengangguran, Kemiskinan	Model analisis kuantitatif dengan data sekunder	Pengaruh tingkat pengangguran (X) tingkat kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat negatif dan signifikan disebabkan oleh sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian melibatkan hampir seluruh anggota keluarga (tingkat pengangguran yang rendah) tetapi dengan penghasilan yang rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga walaupun dengan tingkat pengangguran yang rendah (karena sebagian besar bekerja), namun mereka tetap miskin
3	Sunusi dkk (2014) analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat Pendidikan, pengeluaran pemerintah pada Pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi utara Tahun 2001 -2010	Tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Model analisis kuantitatif	tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah serta kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara. Khusus di Sulawesi Utara Pertumbuhan Ekonomi mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 terjadi kenaikan Pertumbuhan Ekonomi dari setiap tahunnya. Sedangkan, pada tahun 2010

No	Peneliti/ tahun	Variabel	Metode	Hasil
				terjadi penurunan. Kenaikan dan penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan.
4	Widyasworo (2014) analisis pengaruh pendidikan, kesehatan, dan angkatan kerja wanita terhadap kemiskinan di kabupaten gresik (Studi kasus tahun 2008-2012)	Tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja, tingkat kesehatan, kemiskinan		Tingkat pendidikan dan partisipasi angkatan kerja wanita berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan sedangkan tingkat kesehatan berpengaruh namun tidak signifikan. Hubungan yang terjalin antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah berlawanan arah. Ketika salah satu atau semua variabel bebas mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan menurun. Dan variabel partisipasi angkatan kerja wanita berpengaruh paling besar terhadap tingkat kemiskinan karena alasan wanita turun ke dunia kerja lebih dominan disebabkan oleh tuntutan ekonomi keluarga
5	Akbar (2013) Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur) 2000-2012			Jumlah Penduduk (X1), Tingkat Pengangguran (X2), Dan Tingkat Pendidikan (X3), mempunyai pengaruh secara simultan, tetapi hanya tingkat pengangguran (X2) yang berpengaruh secara langsung atau secara signifikan positif terhadap Kemiskinan di Jawa Timur (Y) terbukti kebenarannya karena keempat variabel tersebut mampu menjelaskan variabel dependen (kemiskinan)
	Fitri Amalia (2012) Pengaruh Pendidikan, Pengangguran	Tingkat Pendidikan, Penganggura, Inflasi,	Metode asosiatif dengan data sekunder	Variabel pengangguran tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia Timur. Sedangkan dua variabel

No	Peneliti/ tahun	Variabel	Metode	Hasil
	Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010	Tingkat Kemiskinan		lainnya, yaitu pendidikan dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan statistik uji F, menunjukkan semua variabel independen (pendidikan, pengangguran, dan inflasi) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di KTI pada tingkat kepercayaan 95%.
	Endrayani dan Dewi (2016) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Inflasi, pengangguran, pendidikan, investasi,	Regresi dengan data sekunder	Inflasi berpengaruh menurunkan kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh meningkatkan kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel intervening yaitu pengangguran
	Sri Kuncoro (2014) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011	Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Penganggura, Pendidikan, Tingkat Kemiskinan	Metode asosiatif dengan data sekunder	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, dengan nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0,871315. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur dengan nilai koefisien tingkat pengangguran sebesar -0,165560 hal ini bertentangan dengan teori ekonomi bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dan pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf (AMH) berpengaruh negatif

No	Peneliti/ tahun	Variabel	Metode	Hasil
				terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur dengan nilai koefisien AMH sebesar - 0,687686.
	Susio handayani (2017) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah 2011-2015	Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pendidikan, Kemiskinan	Metode asosiatif dengan data sekunder	Ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di jawa tengah
	Arius Jonaidi (2012) Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia	Pertumbuhan ekonomi	Metode asosiatif dengan data sekunder	Ada interaksi dua arah antara ekonomi pertumbuhan dan kemiskinan. Efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam pengurangan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan ada banyak kantong kemiskinan. lawan dari kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan akses untuk modal, kualitas Pendidikan (melek huruf dan peningkatan panjang pendidikan) dan kesehatan (peningkatan harapan hidup) penduduk miskin dapat meningkatkan produktivitas mereka di Indonesia upaya selama periode 2000-2009. Tingkat pengangguran, dan investasi signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, investasi dalam negeri dan investasi asing, harapan hidup, melek huruf dan sekolah berdampak signifikan pada jumlah orang miskin

No	Peneliti/ tahun	Variabel	Metode	Hasil
	Putri & Yuliarmi (2013) Beberapa Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali	pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan	Metode asosiatif dengan data sekunder	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan diperlukan pemerataan alokasi investasi sehingga ketimpangan pendapatan kabupaten/kota bisa diatasi. Upah minimum sebaiknya disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi, karena bila terjadi inflasi harga kebutuhan buruh naik, pengeluaran mereka juga akan meningkat. Membebaskan biaya pendidikan dalam bentuk apapun, tidak hanya biaya sekolah, biaya kehidupan juga sebaiknya ditanggung. Perluasan kesempatan kerja yang padat karya
	Durrotul Mahsunah (2014) Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur	Jumlah Penduduk, Pendidikan, Pengangguran Kemiskinan	Metode asosiatif dengan data sekunder	Variabel jumlah penduduk dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dikarenakan jumlah penduduk di Jawa Timur lebih didominasi oleh usia-usia produktif sehingga kesempatan kerja

No	Peneliti/ tahun	Variabel	Metode	Hasil
				<p>untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masih terbuka lebar. Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dikarenakan rata-rata penduduk Jawa Timur yang buta huruf berusia relatif cukup tua yang pada masa 15 mudanya tidak mengenyam pendidikan, dan kebanyakan terjadi di daerah pedesaan. Untuk uji F terlihat ketiga variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (kemiskinan)</p>
	<p>Mega Pratidina (2012) Kinerja Keuangan Pemerintah Serta Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2008-2010</p>	<p>Kinerja Keuangan Pemerinta, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan</p>	<p>Metode regresi dengan data sekunder</p>	<p>Pendidikan Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan, kesehatan Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan, dan tingkat kemiskinan selama tahun anggaran 2008-2010 terus mengalami penurunan. Peningkatan taraf pendidikan Kabupaten Blitar tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, itu terbukti dari kualitas tenaga kerja di Kabupaten Blitar yang relatif masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh struktur tenaga kerja pada tahun 2010 berdasarkan pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Blitar. Pembangunan bidang Kesehatan meliputi angka kematian bayi di Kabupaten Blitar untuk tahun 2009 sebesar 14,44%, pada tahun 2010 bergerak menurun jadi 12,01%. Berdasarkan angka tersebut angka kematian bayi berhasil ditekan. Apabila angka</p>

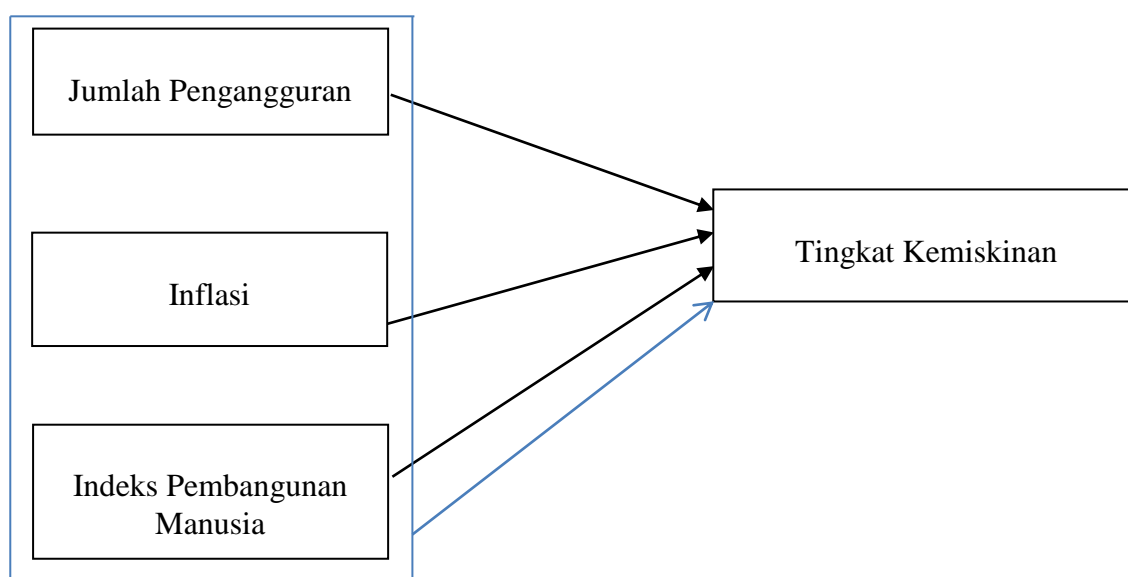
No	Peneliti/ tahun	Variabel	Metode	Hasil
				kematian bayi bisa ditekan, maka harapan hidup panjang dan sehat akan segera terwujud yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian ibu. Sedangkan, tahun 2009 terdapat 13.138 tenaga medis, dengan rasio persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 66,40%. Angka tersebut menunjukkan menurunnya jumlah tenaga medis dan rasio persalinan oleh tenaga kesehatan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Blitar dari tahun 2008 sampai tahun 2010 menurun
	Bintang dan Woyanti (2018) Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015)	Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran Tingkat Kemiskinan	Metode asosiatif dengan data sekunder	Pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat rata-rata lama sekolah dan tingkat harapan hidup memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Di sisi lain, tingkat pengangguran memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
	Leonita & Sari (2019) pengaruh PDRB, pengangguran dan pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia	PDRB, pengangguran, pembangunan manusia, kemiskinan	Metode regresi dengan data panel dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-views.	Laju PDRB, IPM, dan pengangguran secara simultan memberikan pengaruh pada kemiskinan. Pengujian secara parsial menunjukkan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh laju PDRB dan pengangguran. Sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Pemerintah diharapkan fokus dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan pendapatan daerah meningkat, maka diharapkan pengangguran berkurang dan tingkat

No	Peneliti/ tahun	Variabel	Metode	Hasil
				kemiskinan juga berkurang. IPM juga tentunya memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan daerah karena dengan membangun manusia yang baik diharapkan akan meningkatkan standar hidup masyarakat.

Kebaruan yang ditawarkan sesuai dengan hasil penelitian terdahulu adalah menempatkan variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sebagai variabel dependen. Perspektif teori yang digunakan antara lain tentang pendidikan dan kesejahteraan dari Theodore Schultz. Peneliti membandingkan seluruh variabel penelitian yang ada di Kota Bandung dengan Kota Depok di mana perbandingan tersebut tidak dilakukan pada penelitian sebelumnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teori yang telah disebutkan di atas sebelumnya, maka dibentuklah kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan kerangka berpikir di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan, sebagai berikut: Tingkat Pengangguran, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Memiliki Pengaruh Terhadap Kemiskinan di Kota Bandung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu teknik analisis yang dapat digunakan untuk menaksir parameter. Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik variabel-variabel dengan bantuan perangkat lunak. Dari analisis diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel terikat dengan variabel bebas serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel tersebut maka digunakan analisis data deret waktu (*time series*). Model regresi data dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat tingkat kemiskinan di Kota Bandung, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah laju tingkat Pengangguran, Inflasi dan IPM.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran (X1), Inflasi (X2), IPM (Indeks Pembangunan Manusia) (X3), Kemiskinan (Y) di Kota Bandung selama tahun 2003-2018.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2003-2018. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber resmi berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung (BPS), SAKERNAS yang berkenaan dengan Tingkat Pengangguran (X1), Inflasi (X2), IPM (Indeks

Pembangunan Manusia) (X3), Kemiskinan (Y) di Kota Bandung selama tahun 2003-2018.

3.4 Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan kerangka penelitian yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, maka model estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) dalam penelitian ini adalah:

$$TK = f(TP, Inf, IPM)$$

Keterangan :

TK : Tingkat Kemiskinan
 TP : Laju Tingkat Pengangguran
 IPM : Indeks Pembangunan Manusia
 Inf : Inflasi

3.5 Operasional Variabel

Untuk memperjelas variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
 Variabel, Definsi, *Satuan dan Tahun*

No	Variabel	Definisi	Satuan	Tahun
1	Tingkat Pengangguran	Suatu kondisi seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan	Persen	2003-2018
2	Indeks Pembangunan	Kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (<i>state of</i>	Persen	2003-2018

No	Variabel	Definisi	Satuan	Tahun
	Manusia	<i>mind</i>) dari suatu masyarakat yang telah melalui kombinasi tertentu dari proses sosial, ekonomi, dan lembaga, memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik		
3	Inflasi	Penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga dan meningkatnya indeks harga konsumen	Persen	2003-2018
4	Tingkat Kemiskinan	Persentase jumlah penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapitanya berada di bawah garis kemiskinan di Kota Bandung 2003-2018.	Persen	2003-2018

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan data dengan menggunakan *panel data regression model* karena data-data yang akan diolah merupakan *cross section observation* di mana data untuk melihat perbedaan antar Kabupaten/Kota dan *pooling of time series* yakni data untuk menjabarkan perubahan pada kurun waktu 16 tahun yaitu tahun 2003-2018 baik Kota Bandung maupun Kota Depok. Metode panel data ini memiliki ruang dan dimensi waktu

sehingga estimasi variabel dan hasil perhitungan akan memberikan analisis empirik yang lebih luas.

Demikian pula apa yang diungkapkan oleh Hsiao (1986:1-2 dalam Sutjipto, 2003:53), penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan data runtun waktu atau data unit ruang biasa. Pertama, dapat memberikan peneliti sejumlah data yang lebih besar sehingga menaikkan derajat kebebasan dan mengurangi masalah kolinieritas diantara variabel penjelas sehingga akan menghasilkan estimasi ekonometrik yang efisien. Kedua, yang lebih penting lagi adalah data *longitudinal* membolehkan peneliti untuk menganalisis sejumlah pertanyaan penting yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan data runtun waktu dan data antar ruang.

3.7 Pengujian Statistika dan Ekonometrika

3.7.1 Uji t-Statistik

a Uji T-Statistik (Uji Parsial)

Uji T-Statistik merupakan pengujian koefisien regresi secara parsial yang dimaksudkan untuk menentukan variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan adalah dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5%. Sehingga perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: $H_0 : \beta_1, 2, 3, 4 = 0$, artinya variabel independent X_1, X_2, X_3 dan X_4 tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen Y .

$H_1 : \beta_1, 2, 3 \neq 0$, artinya variabel independent X_1, X_2 , dan X_3 berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen Y dengan tingkat kepercayaan $1-\alpha$ dan $df = n - k$.

1. Dalam uji-T apabila probabilitas $< \alpha$ maka H_0 ditolak, berarti bahwa secara individu variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
2. Dalam uji-T apabila probabilitas $> \alpha$ maka H_0 diterima, berarti bahwa secara individu variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Hipotesisi yang diajukan:

H1	:	Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh terhadap kemiskinan baik secara parsial maupun simultan.
H2	:	Terdapat perbedaan pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi Tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan antar Kota Bandung dengan Kota Depok

b Uji F-Statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, variable bebas (X) yaitu Tingkat Pengangguran (X1), dan Indeks Pembangunan Manusia (X2), Inflasi (X3) secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variable terikat (Y) yaitu Tingkat Kemiskinan/Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung.
2. $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, variable bebas (X) yaitu Tingkat Pengangguran (X1), dan Indeks Pembangunan Manusia (X2), Inflasi (X3) secara

simultan tidak ada pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) yaitu Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung.

Hipotesisi yang diajukan

H1 : Tingkat Pengangguran, IPM, Inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Pada tingkat signifikansi (α) 5%, dasar pengambilan keputusan berdasarkan uji F adalah:

1. Dalam uji-F jika probabilitas $< \alpha$ maka H_0 ditolak, berarti bahwa secara individu variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
2. Dalam uji-F jika probabilitas $> \alpha$ maka H_0 diterima, berarti bahwa secara individu variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

c Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi R digunakan untuk mengetahui proporsi sumbangan pengaruh variabel independen secara seretak terhadap variabel independen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model penelitian mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Duwi Priyatno, 2010). Berikut adalah dua sifat R^2 :

1. R merupakan besaran non negatif. Batasnya Suatu R adalah $0 \leq R^2 \leq 1$ sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan R yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.
2. Dalam hubungan regresi, R adalah ukuran yang lebih berarti daripada R^2 karena R mengatakan bahwa proporsi variasi dalam variabel tak

bebas yang dijelaskan oleh variabel yang menjelaskan dan karenanya memberikan suatu ukuran keseluruhan mengenai sejauhmana variasi dalam satu variabel menentukan variasi dalam variabel lain tetapi R tidak mempunyai nilai seperti itu.

Uji kesamaan rata-rata dua pihak menggunakan rumus

$$t' = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}$$

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah:

- S = Simpangan Baku Gabungan
- n_1 = Jumlah Sampel Kota Bandung
- n_2 = Jumlah Sampel Kota Depok
- \bar{X}_1 = Rata-Rata Kelompok Kota Bandung
- \bar{X}_2 = Rata-Rata Kota Depok

Untuk uji t' kriteria pengujiannya adalah tolak hipotesis, jika $t' \geq t_{1-\alpha}$.

Untuk harga lainnya H_0 diterima, distribusi t' dengan tingkat kepercayaan 0,95 dan derajat kebebasan $(dk) = (n_1 + n_2 - 2)$.

Setelah diperoleh nilai t_{hitung} , maka bandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} sesuai dengan derajat kepercayaan.

Kriteria:

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$

Artinya : apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka koefisien korelasi tersebut signifikan yang artinya terdapat perbedaan signifikan antara Kota Bandung dan Kota Depok. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka koefisien korelasi tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik Dengan Ekonometrika

Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Squares/OLS*) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbias Estimator/BLUE*). Untuk mendapatkan kondisi tersebut, model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini selanjutnya dilakukan pengujian sebagai berikut:

a Uji Multikolinear

Uji Multikolinear digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Pengujian terhadap gejala multikolinear dapat dideteksi berdasarkan kaidah *rule of thumb* yaitu:

- 1) Ada tidaknya suatu multikolinear dalam model bisa diindikasikan dengan Nilai R^2 yang tinggi, sementara tak satu pun atau sangat sedikit koefisien regresi parsial signifikan secara statistik (uji t H_0 -nya diterima).
- 2) Menggunakan korelasi parsial (*examination of partial correlations*) yang berkaitan dengan adanya kelemahan dari korelasi derajat nol.

Rule of thumb yang digunakan adalah:

- 1) Bila nilai F -hitung $>$ F tabel, berarti bahwa X_1 berkorelasi dengan variabel penjelas X lainnya pada $\alpha = 5\%$ maupun $\alpha = 10\%$.
- 2) Bila nilai F -hitung $<$ F tabel, berarti bahwa X_1 tidak berkorelasi dengan variabel penjelas X lainnya pada $\alpha = 5\%$ maupun $\alpha = 10\%$.

b Uji Heteroskedastis

Heteroskedastis adalah varians dari residual model regresi yang digunakan dalam penelitian. Adanya heteroskedastis ditandai dengan munculnya unsur gangguan (*disturbance*) pada regresi yang memiliki varians. Jika terdapat

persoalan heteroskedastis maka penaksir yang didapat tidak lagi efisien, baik pada sampel kecil atau pun sampel besar. Akibatnya, dalam Uji-t atau Uji-F bisa muncul kesimpulan yang salah. Pada penelitian ini pengujian untuk melihat ada atau tidaknya masalah heteroskedastis dapat dilakukan dengan menguji residual hasil estimasi menggunakan metode *White Heteroskedasticity (No Cross Term)* dengan membandingkan Obs*R-square dengan nilai Chi-Square. Dengan hipotesis yang digunakan dalam uji *White Heteroskedasticity* ini adalah:

H_0 : Obs*R-square (X² hitung) > Chi-Square (X² tabel), tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi dengan nilai signifikansi $\alpha = 5 \%$

H_1 : Obs*R-square (X² hitung) < Chi-Square (X² tabel), terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi dengan nilai signifikansi $\alpha = 5 \%$

c Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat dikatakan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data runtun atau *time series*) dan data ruang (seperti data antar ruang atau lintas sektoral atau *cross section*). Yang menjadi penyebab adanya autokorelasi antara lain faktor kelambanan waktu (*inersia*), kesalahan dalam pembentukan model, penggunaan log model, tidak memasukkan variabel penting serta adanya manipulasi data. Untuk menguji autokorelasi dapat menggunakan Uji Durbin Watson dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel di mana (n;k) derajat bebas pada tingkat signifikan 5% (k adalah variabel bebas termasuk dengan konstan dan n adalah jumlah observasi). Nilai statistik DW berkisar antara 0 dan 4, jika berada

dekat dengan nilai 2 maka tidak ada autokorelasi pada pertama. Apabila statistik DW mendekati 0 maka terdapat indikasi adanya autokorelasi positif. Namun, bila mendekati 4 berarti adanya autokorelasi negatif. Dengan hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0 : \beta = 0$, tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi

$H_1 : \beta \neq 0$, terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi.

